



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja. LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepada Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Menjabarkan secara singkat, padat dan jelas akan target, realisasi maupun capaian dari sasaran strategis yang memuat indikator kinerja dinas. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memuat tentang apa yang menjadi sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya. Memuat tentang target yang harus dicapai yang dikorelasikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis maupun indikator kinerja. Data realisasi yang dicapai Ketika disandingkan dengan target rencana dapat memberikan pemahaman mendasarkan akan tingkat capaian dinas apakah berhasil atau gagal. Serta permasalahan yang dihadapi, solusi yang diberikan, tindak lanjut yang akan diambil, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kedepannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan semua sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan target yang ditetapkan terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah bekerja dengan baik dalam mewujudkan target yang ditetapkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkayang, Februari 2025
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang

MARTINUS PONES,ST
Pembina Utama Muda
NIP.19661112 200003 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum	5
1.3 Identifikasi Permasalahan & Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategi.....	13
2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	14
2.4 Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Kinerja	17
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2.1 Analisa Sasaran Strategis 1	19
3.2.2 Analisa Sasaran Strategis 2	21
3.2.3 Analisa Sasaran Strategis 3	24
3.2.4 Analisa Sasaran Strategis 4	27
3.2.5 Analisa Sasaran Strategis 5	29
3.3 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Sebagaimana di amanatkan sesuai Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Gambaran Umum SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.2.1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 91 Tahun 2021 Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d. Pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- g. Pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- h. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Sumber Daya Air;
- j. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Bina Marga;
- k. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- l. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. Pengendalian dan evaluasi program pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah

memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub bagian administrasi, umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian rencana kerja dan keuangan.
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang;
6. Bidang Cipta Karya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 sebanyak 50 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai

No	Latar belakang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	2
2	Strata 1	29
3	Diploma 3	7
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	10
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Total		50

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 31 orang atau 56% dari jumlah pegawai.

Golongan Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	40
3	Golongan II	8
Total		50

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tk.II	-
2	Diklatpim Tk.III	1
3	Diklatpim Tk.IV	-
Total		1



Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1	<i>Eselon II B</i>	1
2	<i>Eselon IIIA</i>	1
3	<i>Eselon IIIB</i>	4
4	<i>Eselon IVA</i>	2
5	<i>Eselon IVB</i>	-
Total		8

Kondisi Peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Item inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1	<i>Gedung Kantor</i>	2	2	-
2	<i>Laboratorium / workshop</i>	1	1	-
3	<i>Peralatan kerja</i>	519	473	46
Total		522	500	46

Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat

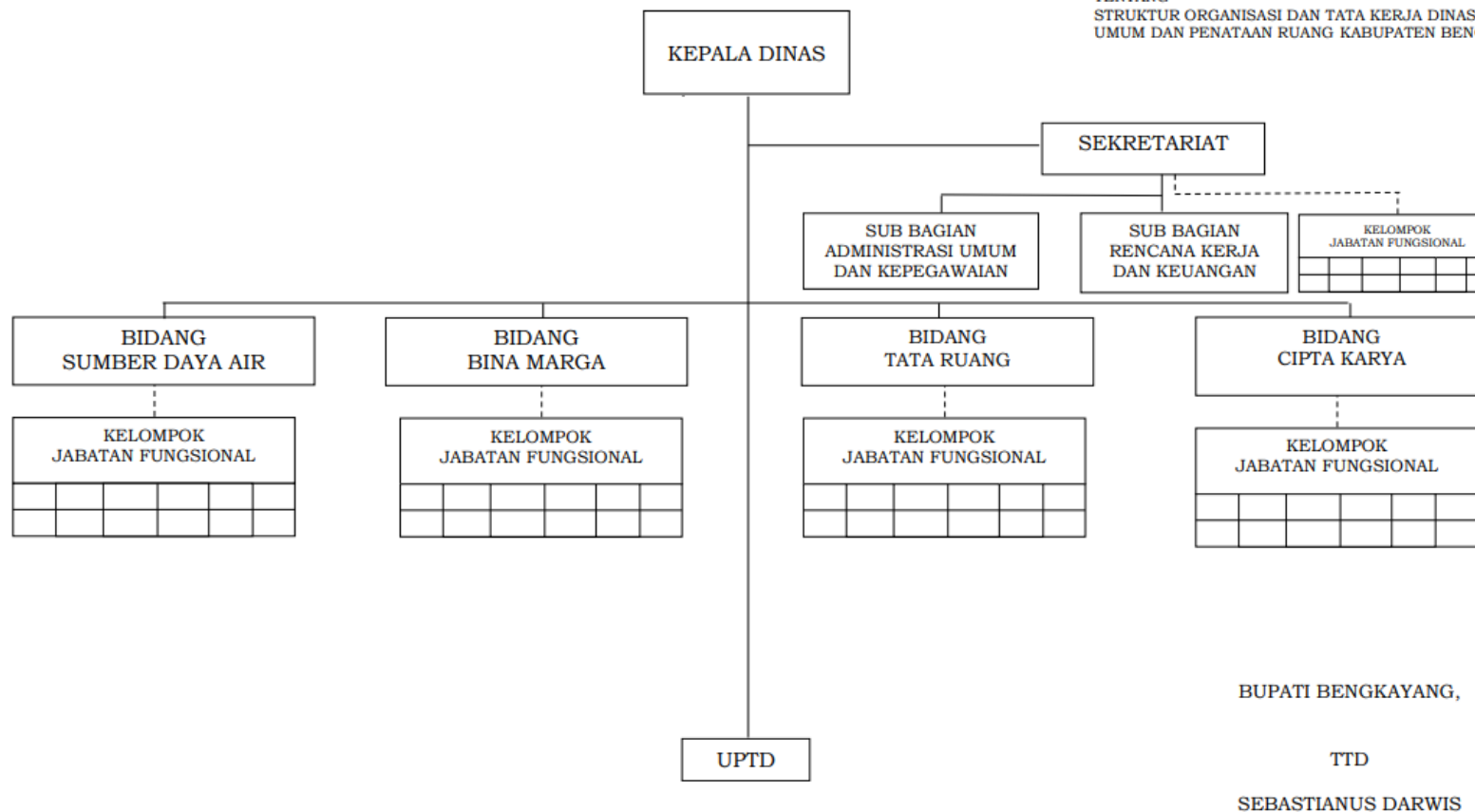
No	Item inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1	<i>Roda Dua</i>	44	38	6
2	<i>Roda Tiga</i>	0	-	-
3	<i>Roda Empat</i>	5	4	1
4	<i>Roda Enam</i>	3	2	1
5	<i>Tronton</i>	1	1	-
6	<i>Excavator</i>	2	2	-
7	<i>Bulldozer</i>	1	1	-
8	<i>Greder</i>	1	1	-
9	<i>Three wheel roller</i>	1	1	-
10	<i>Vibro roller</i>	1	1	-
11	<i>Beko loader</i>	1	-	1
Total		60	51	9



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 91 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG





Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang

No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
A.	Kepala Dinas	melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B.	Sekretaris	memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumahtangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara dan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara; d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C.	Bidang Sumber Daya Air	membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air.	a. penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air; c. mendistribusikan tugas dan memberi bidang Sumber Daya Air; d. petunjuk pelaksanaan kegiatan di melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Sumber Daya Air; e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Sumber Daya Air; g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat



		pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Sumber Daya Air; dan
		h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
D. Bidang Tata Ruang	menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang.	<p>a. Penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang;</p> <p>b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;</p> <p>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;</p> <p>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Tata Ruang;</p> <p>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;</p> <p>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Tata Ruang;</p> <p>g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Tata Ruang; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
E. Bidang Cipta Karya	Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.	<p>a. Penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;</p> <p>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;</p> <p>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Cipta Karya;</p> <p>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;</p> <p>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas</p>



- dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Cipta Karya;
- g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Cipta Karya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Adapun Permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa belum optimal;
2. Peningkatan pelayanan air bersih masih rendah;
3. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai;
4. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
6. Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Percepatan pembangunan jalan baru;
8. Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;

1.3.1. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten DaerahTingkat II Bengkayang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3.2. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Semester I tahun 2024. Capaian Kinerja (performance result) pada Semester I tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam Semester I tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkayang.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas dan rencana tahun 2024 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 1. Capaian IKU
Pada sub bab ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMD.
 2. Realisasi Kinerja
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan strategis dan teknis yang telah diterbitkan yang digunakan sebagai panduan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan



pekerjaan umum, dan

3. Capaian sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah mengambil kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

2.2 KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Visi :	Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka
---------------	--

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,	1.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	1.1.1 Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang 1.1.2 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya 1.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air limbah)
2.	Mewujudkan Pembangunan Daerah berwawasan lingkungan	2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang	2.1.1 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		berdasarkan RTRW dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	

2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman / pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Perumusan Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.				
1.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	<p>1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang</p> <p>2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya</p> <p>3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman</p>	<p>1.1 Peningkatan persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi baik;</p> <p>1.2 Peningkatan konektivitas desa ke kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan ke ibukota kabupaten.</p> <p>2.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas air irigasi</p> <p>2.2 Peningkatan ketersediaan air bersih</p> <p>3.1 Optimalisasi Pengelolaan sanitasi</p>	<p>1.1.1 Pemantapan Kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan</p> <p>1.1.2 Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>1.1.3 Penambahan panjang jalan (jalan baru)</p> <p>1.2.1 Peningkatan akses jalan desa ke jalan kabupaten</p> <p>1.2.2 Peningkatan akses jalan kabupaten ke jalan provinsi dan jalan nasional</p> <p>2.1.1 Rehabilitasi kondisi air irigasi existing</p> <p>2.1.2 Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah.</p> <p>2.2.1 Inventarisasi dan pemanfaatan sumber air baku</p> <p>3.1.1 Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah</p>



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.				
		(mencakup persampahan, air limbah)	3.2 Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 3.3 Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	3.1.2 Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL 3.2.1 Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan 3.2.2 Pengembangan sistem drainase lingkungan perumahan 3.3.1 Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan 3.3.2 Peningkatan mesin pelayanan air minum 3.3.3 Rehabilitasi & Pemeliharaan sarana prasarana air minum
MISI VII : Mewujudkan Pembangunan Daerah berwawasan lingkungan				
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.	1. Penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 2. Peningkatan Mutu, Kualitas dan Layanan dalam rangka pengelolaan bangunan gedung	1.1 Melaksanakan RTRW secara konsisten 1.2 Mengendalikan pemanfaatan ruang 2.1 Peningkatan pengelolaan Sistem Bangunan Gedung (SIMBG) 2.2 Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan handal

2.4 PENETAPAN KINERJA

Dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan LAKIP BAB III pasal 3 bahwa Penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki.

Penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan antara kepala Dinas dengan Bupati Bengkayang. Penetapan ini dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil.

Dokumen Penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target/ Rencana Capaian, Program/ kegiatan dan Anggaran. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Penetapan Kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:
 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 MENGACU SK NOMOR : 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021-2026



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	59,6 KM
		2. Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	70 %
2.	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	1. Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00248 rasio
		2. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,07 %
		3. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	56 %
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1. Rumah tangga berakses air minum	71,82 %
		2. Rumah tangga bersanitasi	64,01 %
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	56,403 %
5.	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	100 %
		2. Rasio bangunan ber IMB per Satuan bangunan	11,5
		3. Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	50
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	1. Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	100

Adapun Program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas adalah:

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Program Penyelenggaraan Jalan	77.260.742.730
	2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.	33.790.000
Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5.600.616.000
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.623.573.000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.330.079.450
	6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.881.073.000
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	-	-
Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	570.000.000
	8. Program Penataan Bangunan Gedung	7.696.495.050
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.933.711.355

Sesuai APBD dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang mengajukan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 126.930.080.585 yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana tersebut diatas.



Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	Program penyelenggaraan jalan	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
2	Persentase Tenaga Terampil KONstruksi yang di latih	Program Pengembangan Jasa KONstruksi	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil KONstruksi - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa KONstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	- Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantaipada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)		- Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	Rumah tangga berakses air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan air minum	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
7	Rumah tangga bersanitasi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan air limbah	- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota
8	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	Tidak ada program dan kegiatan pendukung	
9	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	Program Penyelenggaraan penataan ruang	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota
10	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
11	Persentase jumlah bangunan Gedung yang berfungsi baik		
12	Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang secara umum telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, seluruh target yang telah direncanakan pada tahun 2024 dapat direalisasikan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan caramembandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja diwujudkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, yakni dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian	
Rencana Tingkat	= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
Capaian	

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian	
Rencana Tingkat	= $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
Capaian	

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian skala ordinal sebagai berikut:



Capaian (%)	Predikat/Kategori
$85 < x$	Sangat Baik
$70 < x < 85$	Baik
$55 < x < 70$	Cukup
$x < 55$	Kurang

Untuk capaian masing-masing sasaran disimpulkan dengan menggunakan metode rata-rata datakelompok, yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\sum \text{Indicator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\sum \text{Indicator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai Mean untuk setiap kategori ditetapkan sebagai

berikut: Sangat Baik : 92,5

Baik : 77,5

Cukup : 62,5

Kurang : 27,5

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada table berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	58,64	59,60	31,65	53,10
		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	%	60	70	95	135,71
2.	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Rasio	0,00235	0,00248	0,21	85
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	42,84	47,07	56,48	119,99
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,00	56,00	82,79	147,84
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum	%	69,82	71,82	59,40	82,71
		Rumah tangga bersanitasi	%	59,01	64,01	44,13	68,94
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN		53,720	56,403	58,99	105
5.	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	100	100	100	100
		Rasio bangunan ber IMB per Satuan bangunan	Rasio	9,40	11,5	15	130,43
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	%	40,00	50,00	86,66	173,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	%	100	100	96,64	96,64

Secara garis besar kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dari 6 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2022-2026 beserta dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2024. Realisasi yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 telah mencerminkan target yang telah ditetapkan dalam PERJAKIN. Secara rinci pengukuran tingkat capaian per sasaran strategis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis 1 “Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang”

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	59,6	53,10
2.	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	70	135,71

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yaitu tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang yang tercermin dengan capaian Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/sedang dan Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang.	59,6	31,65	53,10
		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	70	95	135,71

Dari tabel pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk indikator kinerja utama yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang tahun 2024 diukur dari persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Sedangkan Persentase Tenaga terampil konstruksi yang dilatih dihitung dari jumlah tenaga konstruksi yang dilatih dengan tenaga operator/teknis/analisis di Kabupaten Bengkayang. Untuk melihat kondisi jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dan tenaga terampil konstruksi yang dilatih telah dirumuskan melalui tabel berikut ini.

1) Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang tahun 2024

kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang tahun 2024

TAHUN	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
2024	164,558	19,99	95,987	11,66	215,055	26,13	347,488	42,22
2023	152,015	18,47	95,987	11,66	216,221	26,27	358,865	43,60
SATUAN	km	%	km	%	km	%	km	%
PROGRESS	12,543	1,52	0,000	0,00	(1,166)	(0,14)	(11,377)	(1,38)

Sumber data Bidang Bina Marga

Kondisi jalan	Panjang (KM)
Kondisi baik	164,558
Kondisi sedang	95,987
Kondisi rusak ringan	215,055
Kondisi rusak berat	347,488
Total	823,088

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Total Panjang jalan kabupaten sepanjang 823,088 km yang merupakan jumlah total dari kondisi jalan seluruhnya.

Persentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang awal Tahun 2024 sebesar 30,13% atau menunjukkan bahwa keseluruhan jalan kabupaten mantap sepanjang 248,002 Km sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 170/DPUPR/TAHUN 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Februari 2023. Dari keseluruhan jalan kewenangan kabupaten sepanjang 823,088 Km. Sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 575,086 Km.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang pada Tahun 2024 setelah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dari anggaran sebesar Rp. 77.260.742.730 untuk menunjang Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp. 72.705.524.346 atau 94,10% terdapat realisasi target sebesar 31,65 dengan capaian 63,10.

2) Tenaga terampil konstruksi yang dilatih

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
1	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.260.742.730	72.705.524.346	94,10	4.555.218.384	5,90
		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	77.260.742.730	72.705.524.346	94,10	4.555.218.384	5,90
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	33.790.000	30.513.800	90,30	3.276.200	9,70



NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	24.790.000	21.513.800	86,78	3.276.200	13,22
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	100		

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp 77.260.742.730 dengan realisasi sebesar Rp. 72.705.524.346 atau 94,10%, menyisakan anggaran sebesar Rp 4.555.218.384 atau 5,90%. Berhasil mewujudkan pembangunan jalan sepanjang 130,292 KM, 28 unit jembatan, peningkatan jalan sepanjang 17,075 km dan 10 unit jembatan yang diganti/dilebarkan.

Sedangkan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.513.800,00 atau sebesar 90,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.276.200,00 atau sebesar 9,70% berhasil melatih 95 orang tenaga operator/teknisi/analisis selama 2 gelombang pelatihan.

- c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) Program Penyelenggaraan Jalan

Tingkat capaian kinerja sebesar 53,10% menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan Jalan untuk menunjang sasaran strategis tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang, tidak tercapainya target kinerja jalan kondisi baik karena ruas jalan yang diperjanjikan/dilaksanakan tahun ini tidak termuat dalam SK jalan kabupaten, diharapkan tahun berikutnya ruas jalan yang masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran adalah ruas jalan yang masuk dalam SK jalan kabupaten.

Peningkatan jalan aspal, kerikil, tanah dan lainnya (beton) terhadap ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Bengkayang sampai Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan Type of Road Surface	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspal/Paved	565,599	432,444	507,246	374,631	377,483
Kerikil/Gravel	436,904	633,592	573,878	255,687	252,835
Tanah/Soil	257,635	193,679	185,58	167,688	167,688
Lainnya/Others (Beton)	19,862	20,285	13,43	25,082	25,082
Jumlah/Total	1.280	1.280	1.280	823,088	823,088

Capaian ini tidak terlepas dari Kegiatan penyelenggaraan Jalan Kabupaten beserta 11 sub kegiatan yang termuat dalam program Penyelenggaraan Jalan yang telah direalisasi sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	%
1	Pengelolaan Leger Jalan	280.000.000	278.858.973	99,59%



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	%
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.050.800.000	1.029.556.548	97,98%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.278.985.000	1.644.998.225	72,18%
4	Penggantian Jembatan	180.000.000	179.692.000	99,83%
5	Pembangunan Jalan	2.061.000.000	2.060.325.000	99,97%
6	Rekonstruksi Jalan	67.711.342.000	63.974.492.180	94,48%
7	Rehabilitasi Jembatan	680.052.000	612.124.400	90,01%
8	Pembangunan Jembatan	1.260.000.000	990.127.000	78,58%
9	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	299.070.730	298.425.720	99,78%
10	Rehabilitasi Jalan	247.500.000	247.393.000	99,96%
11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.211.993.000	1.209.856.500	99,82%

2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Tingkat capaian kinerja sebesar 135,71% menunjukkan bahwa Program Pengembangan Jasa Konstruksi untuk menunjang sasaran strategis tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang, dengan target Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih telah melampaui target yang ditentukan. Capaian ini tidak terlepas dari Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yang termuat dalam program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan realisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	24.790.000	21.513.800	86,78%
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	9.000.000	9.000.000	100,00%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA/RPJMD

Capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target jangka menengah renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori Cukup berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian kinerja dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA/RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RPJMD
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	59,6	31,65	59,6
2	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	70	95	

Berikut ini analisis capaian kinerja indikator proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik dan sedang bahwa target di Tahun 2024 yaitu sebesar 59,6, dengan Realisasi indikator kinerjanya sebesar 31,65. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 59,6 maka sama dengan target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang di Tahun 2024 **“cukup berhasil”** dengan pencapaian sebesar 62,7% di target akhir tahun RPJMD. Sedangkan capaian kinerja indikator Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih dengan target dalam perubahan Indikator kinerja utama sebesar 70 dengan realisasi indikator kinerja sebesar 95 yang dapat kategorikan **“Sangat Berhasil”**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah KabupatenBengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	menurun	Panjang/luasnya kondisi jalan rusak	Peningkatan usulan pendanaan pada tahun berikutnya
Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	meningkat	Terlaksananya program/kegiatan	

3.2.2 Sasaran Strategis 2 “Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagaikeperluan lainnya”

Table 3.7

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00248	0,00207
2.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	47,07	56,48
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	56	82,79

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diuraikan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya	1 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00248	0.00207	83
		2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	47,07	56,48	119,99
		3 Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	56	82,79	147,84

1) Persentase rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 0,0207 dari target 0,00248 menunjukkan terjadinya tidak ada peningkatan, dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi seluas 5458,9680 Ha pada tahun 2024. Dari keseluruhan jaringan irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

seluas 9664,7598 Ha. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik **“sangat baik”** dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82%.

- 2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai realisasi 56,48% dari target 47,07%, menunjukkan terjadinya peningkatan dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 5458,97 Ha, dari total keseluruhan 9664,7598 Ha luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase luas irigasi dalam kondisi baik **“sangat baik”** dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 119,99%.
- 3) Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai realisasi 82,79% dari target 56%, dari Panjang jaringan drainase kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 505,85 KM, dari total keseluruhan 611,00 KM jaringan drainase kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat **“sangat baik”** dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 147,84%.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
1	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	5.600.616.000	5.546.566.300	99,03	54.049.700	0,97
	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.384.876.000	4.372.988.800	99,73	11.887.200	0,27
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.215.740.000	1.173.577.500	96,53	42.162.500	3,47
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.623.573.000	4.616.269.200	99,84	7.303.800	0,16



NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	4.623.573.000	4.616.269.200	99,84	7.303.800	0,16

Dari tabel diatas diuraikan analisis efisiensi Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air anggaran sebesar Rp **5.600.616.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **5.546.566.300,00** atau 99,03%, menyisakan anggaran sebesar Rp 54.049.700,00 atau 0,97%. Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 2 kegiatan diantaranya :
 - ✓ Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota anggaran Rp **4.384.876.000,00**. Dengan realisasi sebesar Rp. **4.372.988.800,00** atau 99,73% menyisakan anggaran sebesar Rp.11.887.200,00 atau 0,27%.
 - ✓ Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota anggaran Rp **1.215.740.000,00**. Dengan realisasi sebesar Rp. **1.173.577.500,00** atau 96,53% menyisakan anggaran sebesar Rp. 42.162.500,00 atau 3,47%.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota* anggaran sebesar Rp **4.623.573.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **4.616.269.200,00** atau 99,84%, menyisakan anggaran sebesar Rp **7.303.800,00** atau 0,16%.

- c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pengelolaan sumber daya air memiliki 2 kegiatan, 1 diantaranya yang menunjang sasaran strategis tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya, dengan realisasi anggaran mencapai 96,53%. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota memiliki 2 sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya dan pencapaian 2 indikator kinerja utama rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Sedangkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Kegiatan *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota* dengan realisasi anggaran mencapai 99,84% dengan 2 sub kegiatan diantaranya

Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan realisasi anggaran 99,85% dan sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,26%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA

Capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target jangka menengah renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.xx

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA/RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RPJMD
1.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00248	0,00207	0,00248
2.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	42,84	57,53	42,84
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	56	82,79	-

- 1) Analisis capaian kinerja indikator rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik bahwa target di Tahun 2024 sebesar 0,00248 dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 0,00207. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,00248 maka sama dengan target. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator kinerja utama rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di tahun 2024 **“sangat baik”** dengan pencapaian sebesar 0,00261 di target akhir tahun RPJMD.
- 2) Analisis capaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik bahwa target di tahun 2024 sebesar 42,84% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 57,53. Jika realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 42,84 maka sama dengan target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2024 **“sangat berhasil”** dengan pencapaian sebesar 55,53 di target akhir tahun RPJMD.
- 3) Sedangkan analisis capaian kinerja indikator Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat bahwa target di tahun 2024 sebesar 56% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 82,79%. Kesimpulannya adalah bahwa indikator kinerja utama Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat di tahun 2024 **“sangat berhasil”**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	menurun	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	Peningkatan usulan pendanaan pada tahun berikutnya
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	menurun	Target awal kinerja tinggi	Penyesuaian target kinerja
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	meningkat	Ketersedian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	Mempertahankan kondisi

3.2.3 Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Rumah tangga berakses air minum	71,82	59,40
2.	Rumah tangga bersanitasi	64,01	44,13

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) untuk indikator kinerja Rumah tangga berakses air minum dan Rumah tangga bersanitasi diuraikan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1 Rumah tangga berakses air minum	71,82	59,40	82,71
		2 Rumah tangga bersanitasi	64,01	44,13	68,94

1) Indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2024 realisasinya sebesar 60,25%, realisasi ini masih dibawah target sebesar 71,82%. Realisasi 59,40 % bersumber dari persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan Perpipaan. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga berakses air minum dikategorikan “**sangat baik**” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82,71%.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap rumah tangga adalah :

Σ komulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga = 52.316

Σ Jumlah total proyeksi rumah tangga pada tahun eksisting = 88.074

= $\frac{52.316}{88.074} \times 100\% = 59,40\%$

Adapun Program yang mendukung adalah :

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

✓ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dengan realisasi anggaran sebesar 99,64%

✓ Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan realisasi anggaran sebesar 98,49%

2) Sedangkan indikator persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2024 realisasinya sebesar 44,13%, dimana realisasi ini masih dibawah target 64,01%. Realisasi angka 44,13% bersumber dari Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi pada tahun eksisting terhadap total proyeksi

rumah tangga pada tahun existing. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga bersanitasi dikategorikan “**baik**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 68,94%.

Persentase rumah tangga bersanitasi adalah :

- Jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi = 38.046
 - Jumlah total proyeksi rumah tangga pada tahun existing = 86.194
- = $\frac{38.046}{86.194} \times 100\% = 44,13\%$

Adapun Program yang mendukung adalah :

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan dengan realisasi anggaran 99,85%

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)						
	1. Rumah tangga berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM <i>Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.330.079.450	15.101.306.700	98,51%	228.772.750	1,49%
	2. Rumah tangga bersanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	7.881.073.000	7.869.024.500	99,85%	12.048.500	0,15%
Jumlah			23.211.152.450	22.970.331.200	98,36%	240.821.250	1,64%

Dari tabel diatas diuraikan analisis efisiensi Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran Strategis Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah), dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan program Indikator Kinerja Utama *Rumah tanggabersakses air minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.330.079.450,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.101.306.700,00* atau sebesar 98,51%, yang menyisakan anggaran sebesar Rp. 228.772.750,00 atau sebesar 1,49%
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah Program Indikator Kinerja Utama Rumah Tangga Bersanitasi dengan pagu anggaran sebesar Rp **7.881.073.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.

7.869.024.500,00 atau 99,85%, menyisakan anggaran sebesar Rp 12.048.500,00 atau 0,15%.

- c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) memiliki 2 indikator kinerja utama dan didukung oleh 2 program kegiatan diantaranya :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan diantaranya adalah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan realisasi anggaran 99,64% dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan realisasi anggaran mencapai 98,49%.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki 1 kegiatan yang menjadi penunjang sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya adalah Rumah tangga bersanitasi yaitu kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota dengan realisasi anggaran mencapai 98,36%

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target jangka menengah Renstra/ RPJMD masuk pada kategori **cukup berhasil**. Lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah renstra/ RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.xx

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA/RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RPJMD
1.	Rumah tangga berakses air minum	71,82	59,40	71,82
2.	Rumah tangga bersanitasi	64,01	44,13	64,01

Analisis capaian kinerja indikator rumah tangga berakses air minum menunjukkan bahwa target di tahun 2024 sebesar 71,82% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 59,40%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 71,82% maka masih dibawah target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama rumah tangga berakses air minum menunjukkan di tahun 2024 **“cukup berhasil”** dengan pencapaian sebesar 75,82 di target akhir tahun RPJMD. Sedangkan analisis capaian kinerja indikator rumah tangga bersanitasi bahwa target di tahun 2024 sebesar 64,01% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 44,13%. Jika realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 64,01% maka masih dibawah target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama rumah tangga bersanitasi di tahun 2024 **“cukup berhasil”** dengan pencapaian sebesar 74,01% di target akhir tahun RPJMD.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi.

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1.	Rumah tangga berakses air minum	Mengalami Penurunan	Dana pembangunan Masih terbatas	Kegiatan seluruhnya bersumber dari dana DAK tanpa dukungan DAU
2.	Rumah tangga bersanitasi			

Dari tabel dapat disampaikan analisis penyebab dan solusi mengatasi masalah yang diuraikan bahwa realisasi indikator kinerja utama pada rumah tangga berakses air minum tahun 2024 sebesar 59,40%, dan masih berada di bawah target Pemerintah sebesar 71,82%. Sedangkan rumah tangga bersanitasi tahun 2024 sebesar 44,13%, dan masih berada di bawah target Pemerintah sebesar 64,01%.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk dapat meningkatkan kedua indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) adalah dengan memanfaatkan dana DAK

3.2.4 Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	56,403	58,99

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan yang tercermin dengan capaian indikator Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	56,403	58,99	105

Sumber data : PLN ULP Bengkayang

Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Tahun 2024 realisasinya sebesar 58,99%, realisasi ini melampaui target sebesar 56,403%. Realisasi 58,99 % bersumber dari Persentase Jumlah Rumah Tangga pengguna listrik PLN. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah tangga pengguna listrik PLN dikategorikan “**Sangat Baik**” dengan pencapaian Indikator Sasaran adalah 105%. Sasaran strategis ini tidak ada Program yang mendukung pelaksanaannya karena tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Kabupaten Bengkayang adalah :

Σ komulatif rumah tangga pengguna listrik PLN di Kabupaten Bengkayang =51.955

Σ Jumlah total proyeksi rumah tangga pada tahun exsisting = 88.074

$$= \frac{51.955}{88.074} \times 100\% = 58,99\%$$

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.18

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan						
	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN						

Analisis efisiensi Penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan sebagaimana pada tabel diatas adalah tidak ada program yang mendukung karena tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Karena tidak adanya program / kegiatan yang menjadi penunjang sasaran strategis Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan maka yang menjadi penunjang keberhasilan ataupun kegagalan atas sasaran strategis ini tidak dapat dianalisis.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target jangka menengah Renstra / RPJMD masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah renstra/ RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.xx

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA/RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RPJMD
1.	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	56,403	58,99	56,403

Analisis capaian indicator kinerja utama Rumah tangga pengguna listrik PLN menunjukan bahwa target di tahun 2024 sebesar 56,403% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 58,99%. Jika realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 56,403% maka sudah melampaui target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Rumah tangga pengguna listrik PLN menunjukan di tahun 2024 “**sangat berhasil**” dengan pencapaian sebesar 62,185 di target akhir tahun RPJMD.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan / Penurunan	Penyebab	Solusi
1.	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	peningkatan	Terbatasnya kewenangan	bantuan kepadarumah tangga tidak mampu

Dari tabel dapat disampaikan analisis penyebab dan solusi mengatasi masalah yang diuraikan bahwa realisasi indikator kinerja utama pada *Rumah tangga pengguna listrik PLN* tahun 2024 sebesar 58,99%, dan berada di atas target Pemerintah sebesar 56,403%, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk dapat meningkatkan indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu.

3.2.5 Sasaran Strategis 5 “Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	100	100
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	11,5	15
3.	Persentase jumlah Bangunan Gedung yang berfungsi baik	50	86,66

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW yang tercermin dengan capaian indikator dari Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	100	100	100
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	11,5	15	130
		Persentase jumlah Bangunan Gedung yang berfungsi baik	50	86,66	173

Untuk mewujudkan **sasaran strategis 5** Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW dengan Indikator Kinerja utama :

- 1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) dengan capaian kinerja 100%, realisasi ini sama dengan target pada tahun 2024. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama dikategorikan “Sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 100%.

Adapun Program yang mendukung adalah :

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,

- Konsultasi Evaluasidan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasidan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 2) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan , Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kawasan/bangunan yang sesuai dengan peraturan perijinan adalah berhasil meningkatkan persentase bangunan yang ber-IMB dari yang ditargetkan 11,5% dengan mencapai realisasi 15%, untuk persentase banguna yang beri-IMB per satuan Bangunan 130,43%
- 3) Sedangkan Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang berfungsi baik (merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU tambahan sesuai SK No 17 Tahun 2024) dengan target kinerja sebesar 50 %, realisasi kinerja 86,66%.
- b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel berikut menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung Pencapaian indikator kinerja utama.

Tabel 3.xx

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
1	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW. 1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW).	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	570.000.000	515.472.500	90,43%	54.527.500	9,57%
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	225.000.000	211.362.400	93,94%	13.637.600	6,06%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	264.624.700	88,21%	35.375.300	17,79%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	39.485.400	87,75%	5.514.600	12,25%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
	2.Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.696.495.050	7.663.997.905	99,58%	32.497.145	0,42%
	3.Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik.						

Dari tabel diatas diuraikan analisis efisiensi Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran Strategis Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan program Indikator Kinerja Utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 570.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 515.472.500,00 atau sebesar 90,43 %, yang menyisakan anggaran sebesar Rp. 54.527.500,00 atau sebesar 9,57%
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung adalah Program Indikator Kinerja Utama Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan dan Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik dengan pagu anggaran

sebesar Rp **7.696.495.050,00** dengan realisasi sebesar Rp. **7.663.997.905,00** atau 99,58%, menyisakan anggaran sebesar Rp 32.497.145,00 atau 0,42%.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW dengan 3 indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) yang didukung oleh program penyelenggaraan dan penataa ruang dengan 3 kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran mencapai 93,94%.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan realisasi 98,85 %
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota dengan realisasi 86,57%
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yakni Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang dengan realisasi 87,75%

2) Indikator Kinerja Utama Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan dan Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik di dukung oleh Program Penataan Bangunan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung diuraikan sebagai berikut :

- Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan, Indikator Kinerja Utama ini di dukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG dengan realisasi anggaran sebesar 93,72%. Capaian tersebut juga memberikan manfaat pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.180.364.891,00-
- Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik di dukung oleh sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 99,73%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target jangka menengah Renstra / RPJMD masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya perbandingan

capaian kinerja dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah renstra/ RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA/RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Target RPJMD
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	100	100	100
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan.	11,5	15	
3.	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik	50	86,66	

Analisis capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW dengan 3 Indikator Kinerja Utamanya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) menunjukkan bahwa target di tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 100%. Jika realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) 2024 sama dengan target. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) menunjukkan di tahun 2024 “sangat berhasil” dengan pencapaian sebesar 100% di target akhir tahun RPJMD.
- 2) Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan, ditargetkan sebesar 11,5% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 15%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan melampaui target. Capaian kinerja menunjukkan di tahun 2024 “sangat berhasil”
- 3) Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik ditargetkan sebesar 50% dengan realisasi indikator kinerjanya sebesar 86,66%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik melampaui target. Capaian kinerja menunjukkan di tahun 2024 “sangat berhasil”

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	Capaian kinerja bertahan	Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan tata ruang; 2. Membangun sistem informasi tentang pemanfaatan ruang yang lebih terintegrasi agar diketahui masyarakat;
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	Peningkatan	- Ketersediaan anggaran - kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan IMB/PBG untuk setiap bangunan	1. peningkatan kapasitas aparatur yang menangani penyelenggaraan IMB. 2. Sosialisasi tentang manfaat IMB /PBG kepada masyarakat
Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik	Peningkatan	- Ketersediaan anggaran - Terlaksananya program/kegiatan	1. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gedung

3.2.6 Sasaran Strategis 6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD	100	94,95

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2024

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah yang tercermin dengan capaian indikator Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terhadap Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah	Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD	100	94,95	94,95

Untuk mewujudkan **sasaran strategis 6** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah dengan Indikator Kinerja utama Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD dengan target sebesar 100%, realisasi indikator kinerjanya sebesar 96,64%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD tidak mencapai target.

Program pendukung sasaran strategis ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 kegiatan diantaranya :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung Pencapaian indikator kinerja utama.

Tabel 3.xx

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Anggaran	%
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.933.711.355	7.533.217.404	94,95%	400.463.951	5,05%
	Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.180.000	67.723.000	96,50%	2.457.000	3,5%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.994.849.635	4.645.262.053	93,00%	349.587.582	7%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.027.000	26.277.000	93,76%	1.750.000	6,24%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.469.012	2.091.400	84,71%	377.612	15,29%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.141.000	688.982.900	96,07%	28.158.100	3,93%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.050.000	159.090.000	99,40%	960.000	0,6%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.288.460.568	1.276.639.641	99,08%	11.820.927	0,92%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.534.140	667.151.410	99,20%	5.382.730	0,8%

Dari tabel diatas diuraikan analisis efisiensi Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah, dijelaskan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota program Indikator Kinerja Utama Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.933.711.355,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.533.217.404,00 atau sebesar 94,953%, yang menyisakan anggaran sebesar Rp. 400.463.951,00 atau sebesar 5,05%.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran strategis Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah dengan indikator kinerja utama Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 96,50%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi anggaran mencapai 93%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 93,76%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 84,71%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 96,07%



- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 99,40%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 99,08%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran mencapai 99,20%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD	Tidak mencapai target	Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	peningkatan kapasitas aparatur

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 126.930.080.585,00 dengan rincian sebagaimana pada table berikut :

Program, Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.933.711.355,00	7.533.217.404,00	94,95%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.180.000,00	67.723.000,00	96,50%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.994.849.635,00	4.645.262.053,00	93,00%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.027.000,00	26.277.000,00	93,76%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.469.012,00	2.091.400,00	84,71%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.141.000,00	688.982.900,00	96,07%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.050.000,00	159.090.000,00	99,40%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.288.460.568,00	1.276.639.641,00	99,08%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.534.140,00	667.151.410,00	99,20%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.600.616.000,00	5.546.566.300,00	99,03%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.384.876.000,00	4.372.988.800,00	99,73%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.215.740.000,00	1.173.577.500,00	96,53%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.330.079.450,00	15.101.306.700,00	98,51%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.330.079.450,00	15.101.306.700,00	98,51%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.881.073.000,00	7.869.024.500,00	99,85%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.881.073.000,00	7.869.024.500,00	99,85%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.623.573.000,00	4.616.269.200,00	99,84%



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.623.573.000,00	4.616.269.200,00	99,84%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.696.495.050,00	7.663.997.905,00	99,58%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.696.495.050,00	7.663.997.905,00	99,58%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.260.742.730,00	72.525.849.546,00	93,87%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	77.260.742.730,00	72.525.849.546,00	93,87%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	33.790.000,00	30.513.800,00	90,30%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	24.790.000,00	21.513.800,00	86,78%
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	570.000.000,00	515.472.500,00	90,43%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	225.000.000,00	211.362.400,00	93,94%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	264.624.700,00	88,21%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	39.485.400,00	87,75%
JUMLAH		126.930.080.585,00	121.402.217.855,00	95,64%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang menyajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai dengan Perjanjian Kinerja Eselon 3.
- b. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pada tahun ini, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk tahun kedua Renstra, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi di tahun sebelumnya.
- c. Hasil Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebesar 101,04% dimana hasil ini diperoleh dari data kegiatan dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan jumlah yang demikian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang di katagorikan “Sangat Berhasil”.
- d. Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang didukung dana sejumlah sebesar Rp. 126.930.080.585,00 dengan realisasi sebesar Rp. 121.402.217.855,00 atau 95,64%;
- e. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

4.2 SARAN

1. Meningkatkan mekanisme penyelenggaraan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan disertai dengan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mendukung tercapainya capaian indikator kinerja yang lebih optimal.



Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini, semoga dapat memberikan bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Bengkayang, 26 Februari 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang

MARTINUS PONES,ST
Pembina Utama Muda
NIP.19661112 200003 1 004